NAMA: MIFTAHUL JANNAH

NIM: 70200120052

PRODI: KESEHATAN MASYARAKAT (D)

DOSEN PENGAMPU :

SYAMSUL ALAM S.KM.,M.KES

TOPIK 4. PEMANFAATAN BPJS KESEHATAN PADA LAYANAN KESEHATAN (MID)

Pendahuluan

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak dasar masyarakat yang penyelenggaraannya wajib diberikan oleh pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat 1 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, berhak mendapat hak hidup sehat jasmani dan rohani. tempat tinggal, serta memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat. dan berhak atas pelayanan kesehatan ([Suprianti A, 2017](#)). Pemerintah Indonesia telah mencanangkan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang bertujuan untuk memenuhi jaminan kesehatan universal pada tanggal 1 Januari 2014 ([Fadly F, Vianny O. 2019](#)).

Beban kerja yang tidak sesuai jika dilihat dari aspek kuantitas kegiatan yang dilakukan oleh tenaga medis baik dokter spesialis maupun tenaga medis lainnya dapat menimbulkan stress dan berakibat pada kualitas pelayanan yang diberikan pada pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. [Fitriani et al.\(2016\)](#).

[Kurniawan \(2016\)](#) yang menyimpulkan bahwa beban kerja memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja petugas. Sejalan dengan penelitian [tyas \(2009\)](#), yang menyatakan semakin tinggi beban kerja berlebihan (work-overload) semakin tinggi pula stres kerjanya. sehingga ada hubungan antara beban kerja (work-overload) dengan stres kerja.

Maka tentunya dibutuhkan analisis kebutuhan tenaga kesehatan (paramedis) berdasarkan beban kerja dengan menggunakan metode WISN (Workload Indicators of Staffing Need),dimana metode tersebut merupakan indikator yang menunjukkan besarnya kebutuhan tenaga pada sarana kesehatan berdasarkan beban kerja, sehingga lokasi/relokasi akan lebih mudah dan rasional, cara yang di gunakan untuk menjumlah semua beban kerja adalah dengan membagi kapasitas kerja perorangan persatuan waktu. Kelebihan metode ini mudah dioperasikan, mudah digunakan, secara teknis mudah diterapkan, komprehensif dan realistis. [Alam, S., Raodhah, S., & Surahmawati, S. \(2018\)](#).

Sistem JKN/ BPJS memiliki peran yang besar kepada peserta BPJS kesehatan. Apabila pelayanan yang diberikan baik maka akan semakin banyak peserta BPJS yang memanfaatkan pelayanan kesehatan, namun dapat terjadi sebaliknya jika pelayanan dirasakan kurang memadai. Pelayanan kesehatan yang baik merupakan suatu

kebutuhan masyarakat dan sering kali menjadi ukuran dalam keberhasilan pembangunan. Menyadari bahwa pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan setiap warga negara maka pemerintah berupaya dari waktu ke waktu untuk menghasilkan program-program yang dapat meningkatkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Salah satu program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia adalah penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menurut Undang-undang (UU) yakni UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). [Rumengan, D. S., Umboh, J. M. L., & Kandou, G. D. \(2015\).](#)

JKN diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) yang disahkan dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Presiden Republik Indonesia [\(BPJS Kesehatan, 2019\)](#). Program JKN menawarkan manfaat yang komprehensif, mulai dari penanganan penyakit menular hingga penyakit yang memerlukan intervensi mahal, seperti terapi jantung, cuci darah dan kanker [\(Situmorang H C, 2016\)](#).

Prinsip-prinsip penyelenggaraan BPJS adalah gotong royong, partisipasi wajib, iuran berdasarkan persentase pendapatan upah, nirlaba dan manajemen yang amanah [\(Yandrizal & Utami, 2017\)](#). Menurut data yang diperoleh dari BPJS Kesehatan bulan Januari 2020 jumlah peserta JKN Mandiri di kota Makassar sebanyak 174.867 orang, sasaran program Jaminan Kesehatan Nasional yaitu untuk mencapai target Jaminan Kesehatan Semesta menjadi peserta BPJS Kesehatan tidak hanya wajib bagi pekerja di sektor formal tetapi pekerja dari sektor informal juga diwajibkan untuk mengikuti BPJS Kesehatan. [\(Pangestika, Jati, & Sriatmi, 2017\)](#).

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S., Raodhah, S., & Surahmawati, S. (2018). Analisis Kebutuhan Tenaga Kesehatan (Paramedis) Berdasarkan Beban Kerja Dengan Menggunakan Metode Workload Indicator Staffing Needs (WISN) di Poliklinik Ass-Syifah UIN Alauddin Makassar. *Al-sihah: The Public Health Science Journal*, 10(2).
- BPJS Kesehatan. (2019). Data Peserta BPJS Kesehatan. Makassar.
- Fadly F, Vianny O. (2019). Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2018 di Provinsi Riau. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 8 (4), 164 – 167.
- Pangestika, V. F., Jati, S. P., & Sariatmi, A. (2017). Faktor–Faktor yang Berhubungan dengan Kepesertaan Sektor Informal dalam Bpjs Kesehatan Mandiri di Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 5(3), 39–48.
- Rumengan, D. S., Umboh, J. M. L., & Kandou, G. D. (2015). Faktor–faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada peserta BPJS kesehatan di Puskesmas Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado. *Jikmu*, 5(2).
- Situmorang H C. (2016). Kestinambungan PendanaanJKN–BPJS Kesehatan. *Jurnal Farmasi Indonesia*, 8 (1).<https://doi.org/10.35617/JFI.V8I1.418>
- Suprianti A. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. *Journal Of Governance and Public Policy*, 4 (1).<https://doi.org/10.18196/jgpp.4172>.
- Surahmawati, S., Rahmat, N. A., Sahrir, S., & Alam, S. (2020). THE DETERMINANT EFFECT OF HEALTH BPJS FEE PAYMENT ON FEE COMPLIANCE OF INDEPENDENT JKN PARTICIPANTS. *Hospital Management Studies Journal*, 1(1), 14–26.
- Yandrizal, Y., & Utami, S. P. (2017). Analisis kemampuan dan kemauan membayar iuran terhadap pencapaian UHC JKN di Kota Bengkulu. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 10(1), 3–10.